

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi ini karena melihat berbagai permasalahan yang ada di kabupaten ende diantaranya lambatnya pertumbuhan ekonomi, kurangnya infrastruktur pembangunan terhadap masyarakat, lemahnya pembangunan di sektor pertanian yang seharusnya menjadi sumber utama PAD kabupten Ende.

B. Jenis data dan sumber data

Data skunder, pengertian dari data sekunder menurut Sugiyono (2010:137), adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam arti Data skunder adalah data yang disajikan oleh pihak lain atau yang dikumpulkan melalui pihak lain. Berupa data anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Ende tahun 2013-2015.

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang ada kemudian melakukan pencatatan atau pengcopyan terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik data keuangan maupun non keuangan.

D. Teknik analisis data

Analisa data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. S. Nasution(1996:126), menjelaskan bahwa menyusun data berarti menggolongkannya kedalam pola, tema atau kategori sehingga dengan demikian tidak akan terjadi *chaos*. Tafsiran atau interpretasi data artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep yang mencerminkan pandangan atau perspektif peneliti, dan bukan kebenaran. Kebenaran hasil penelitian masih harus dinilai orang lain dan diuji dalam berbagai situasi lain.

1) Analisis data menggunakan *Value For Money*

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui konsep *value for money* yang dikembangkan dalam keuangan. Menurut (Mardiasmo, 2009: 133), langkah-langkah mengukur *value for money* sebagai berikut:

a. Pengukuran ekonomi

Ekonomis (kehematan) sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu, tingkat ekonomis sebuah anggaran biasa dilihat dari beberapa presentase tingkat pencapaian. Tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya. Rasio ekonomi dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\text{realisasi pengeluaran}}{\text{anggaran pengeluaran}} \times 100\%$$

Dalam hal ini ekonomi merupakan ukuran relatif, berbagai pertanyaan yang perlu diperhatikan dalam pengukuran ekonomi, antara lain; Pertama, apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi. Kedua, Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi sejenis yang dapat diperbandingkan, dan ketiga, apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansial secara maksimal. Tiga pertanyaan ini dapat dikatakan sebagai pertanyaan mendasar, dan selanjutnya masih dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mengetahui tingkat ekonomisnya.

Ketentuan:

Jika <100% berarti ekonomis

Jika >100% berarti tidak ekonomis

Jika =100% berarti ekonomis berimbang

b. Pengukuran efisiensi

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan metode operasi (*method operation*), proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input. tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja. Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah. Rasio efisiensi dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{realisasi pengeluaran}}{\text{realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Dalam organisasi sektor public setiap pengeluaran perlu dibuat standar belanjanya (*standard spending assessment*) sebagai bentuk standar biaya, pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan standar belanjanya. Penetapan standar belanja tersebut sebelumnya juga sudah harus mempertimbangkan aspek ekonomi serta standar pelayanan publik minimum yang harus dipenuhi.

Ketentuan:

Jika <100% berarti efisien

Jika >100% berarti tidak efisien

Jika =100% berarti efisien berimbang

c. Pengukuran efektifitas

Efektifitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*. *Outcome* merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan, tingkat efektifitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan presentase tingkat pencapaiannya. Rasio tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{realisasi pendapatan}}{\text{anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Apabila organisasi berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Ketentuan:

Jika >100% berarti efektif

Jika <100% berarti tidak efektif

Jika =100% berarti efektifitas berimbang

2) Analisis rasio tambahan

a. Rasio kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah biasanya dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut:

Rasio kemandirian =

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah daerah/provinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumberdaya ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Rasio kemandirian juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemembangunan daerah.

Kriteria rasio kemandirian

Nilai	Kriteria
0% - 25%	Rendah sekali
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996

b. Rasio pertumbuhan (*growth ratio*)

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dalam satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan dapat diformulasikan sebagai berikut:

Rasio pertumbuhan

$$= \frac{\text{realisasi penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{realisasi penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio pertumbuhan \sum pendapatan

$$= \frac{\text{realisasi penerimaan } \sum \text{pendapatan } x - x_{n_1}}{\text{realisasi penerimaan } \sum \text{pendapatan } x_{n_1}} \times 100\%$$

Penjelasan:

X_n = pendapatan tahun sekarang

X_{n-1} = pendapatan tahun sebelumnya

c. *Dept services coverage ratio (DSCR)*

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian daerah (BD), dari PBB, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHPB), penerimaan Sumber Daya Alam dan Bagian Daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib (BW) dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan angsuran pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Biaya Wajib (BW) dalam hal ini berasal dari jumlah belanja rutin dan dana alokasi khusus (DAK). Adapun ketentuan yang menyangkut persyaratan DSCR yaitu:

- a) Ketentuan yang menyangkut persyaratan
 1. Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75% dari penerimaan APBD
 2. DSCR maksimal 2,5%
- b) Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman
 1. Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat.
 2. Pinjaman jangka pendek untuk mengatur arus kas.

DSCR dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{(PA + B + BP)} \times 100\%$$

Penjelasan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

- BW = Belanja Wajib
PA = Pokok Angsuran
B = Bunga
BP = Biaya Pinjaman

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain, yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. DSCR minimal sebesar 2,5 merupakan ketentuan yang menyangkut persyaratan dalam menggunakan alternatif sumber dana lain yaitu dengan melakukan pinjaman. Jika DSCR lebih dari atau sama dengan 2,5 berarti pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Sebaliknya, jika DSCR kurang dari 2,5 maka pemerintah daerah tidak dapat melakukan pinjaman lagi.